

DAFTAR PUSTAKA

- Prakoso, A. (2016). *Hukum Perlindungan Anak*. Laksbang Pressindo. Yogyakarta.
- Adjis, C. A. (2005). Alkohol, Tki, dan Perdagangan Anak: Perspektif Kejahatan Transnasional. *Indonesian Journal of Criminology*, 4(1).
- Adha, F. (2023). Penanganan Pengungsi di Indonesia Melalui Kerjasama KEMENKUMHAM dengan International Organization of Migration. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 8(2), 123-133.
- AG. Subarsono. (2012). *Analisis kebijakan publik: konsep, teori dan aplikasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Akvianto, L., Zebua, N. S., & Ragawati, P. D. (2022, Februari). Regulasi Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(1), 22-23.
- Al Amien, J. (2019). Tumpang Tindih Penanganan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang: Imigrasi atau POLRI.
- Al Machmudi, M. I. (2021, Desember 3). *Perdagangan Orang Masih Merajalela di tengah Pandemi, Perempuan jadi Korban Terbanyak*. Media Indonesia. Retrieved November 21, 2024, from <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/451302/perdagangan-orang-masih-merajalela-di-tengah-pandemi-perempuan-jadi-korban-terbanyak>
- Anindia, I. A. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Perdagangan Anak dengan Modus Pernikahan dalam Perspektif Viktimologis. *Litigasi*, 19(1). <https://doi.org/10.23969/litigasi.v19i1.776>
- Ansari, S. (2021). Konsep Advokasi Terhadap Anak Korban Perdagangan Anak. *Jurnal Transformatif*, 5(1), 51–64. <https://doi.org/10.23971/tf.v5i1.2661>
- Antara. Pemprov NTT sebut 185 pekerja jadi korban TPPO selama 2023. diakses melalui <https://www.antaraneews.com/berita/3672159/pemprov-ntt-sebut-185-pekerja-jadi-korban-tpo-selama-2023>, pada 12 Januari 2025.
- Arief, B. N. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan* (1st ed.).

- Aqnisyah, D. I., & Azmawati, D. (2023). Evaluating The Effectiveness of Indonesia-Iom Cooperation in The Governance of Human Trafficking and Illegal Labor Migration. *UMYGrace*, 3(1), 199.
- Badan Pusat Statistik. (2024, July 17). *Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi dan Daerah - Tabel Statistik*. Retrieved November 22, 2024, from <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTkyIzI=/persentase-penduduk-miskin--p0--menurut-provinsi-dan-daerah.html>
- Baihaqi, A. I., Salam, S. P., & Warganegara, H. F. (2021). Pentingnya Kerjasama Antara Pemerintah Indonesia dengan International Organization of Migration (IOM). *Jurnal Ekonomi, Sosial, & Humaniora*, 2(10), 5.
- Bappeda Jabar. Jabar Targetkan 27 Daerah Bentuk Gugus Tugas TPPO. diakses melalui <https://bappeda.jabarprov.go.id/jabar-targetkan-27-daerah-bentuk-gugus-tugas-tpo/> pada 12 Januari 2025.
- Bhaskara, N. B. A., Sugiarta, I. N. G., & Sudibya, D. G. (2021). Tinjauan Yuridis terhadap Dampak Eksploitasi Perdagangan Anak dengan Modus Perkawinan. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1), 5–9. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2958.5-9>
- Data DPPPA Provinsi Lampung Tahun 2017-2021. Diakses melalui <https://dinaspppa.lampungprov.go.id/download/all>, pada 12 Januari 2025.
- Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia. (2024, Agustus 1). *Pernyataan Sikap Bersama Peringatan Hari Anti Perdagangan Orang Sedunia*. Retrieved November 20, 2024, from <https://dfw.or.id/pernyataan-sikap-bersama-peringatan-hari-anti-perdagangan-orang-sedunia/>
- Duka, J. M.R. (2021). Optimalisasi Tugas TNI dalam Pelaksanaan Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia dengan Negara Lain. *Kertas Karya Perorangan (TASKAP) Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII*.
- Faisal, S. (2010). *Format-Format Penelitian Sosial, Dasar-Dasar dan Aplikasi*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Hamim, A., & Rosenberg, R. (2003). *Kajian Perundang-undangan Indonesia Dalam Perdagangan. Perdagangan dan Anak di Indonesia*. USAID.

- Hapsari, I. P. (2020). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Anak Di Indonesia. *Jurnal Justiciabelen*, 2(1), 55. <https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v2i1.1171>
- Hatta, M. (2012). *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Teori dan Praktek* (1st ed.). Liberty, Yogyakarta.
- Herlan & Agus Sikwan. (2018, Desember). Pencegahan Dan Penanggulangan Masalah Perdagangan Wanita (Trafficking) Di Kecamatan Jagoi Babang Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 23, 103.
- Institute for Criminal Justice Reform. (2021, Juli 30). *Perlu Segera Mereformasi Kebijakan Anti Perdagangan Orang di Indonesia*. Retrieved November 22, 2024, from <https://icjr.or.id/perlu-segera-mereformasi-kebijakan-anti-perdagangan-orang-di-indonesia/>
- International Organization for Migration. (n.d.). Pendanaan dan Donor. Retrieved Desember 20, 2024, from https://www-iom-int.translate.goog/funding-and-donors?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=rq
- International Organization for Migration. (2016, Maret 1). *Leveraging Information Technology to Combat Human Trafficking*. Retrieved November 21, 2024, from <https://www.iom.int/news/leveraging-information-technology-combat-human-trafficking>
- IOM. (2020). *Profil Perdagangan Orang di Daerah Perbatasan Kalimantan*. Retrieved Januari 13, 2025, from https://indonesia.iom.int/sites/g/files/tmzbd11491/files/documents/Profil%20Perdagangan%20Orang%20di%20Daerah%20Perbatasan%20Kalimantan_1.pdf
- IOM Indonesia. (2021). *IOM Indonesia Covid-19 Strategic Response and Recovery Plan 2021*. Retrieved November 20, 2024, from <https://indonesia.iom.int/sites/g/files/tmzbd11491/files/documents/IOMIndonesiaCOVID19SRRP2021.pdf>
- Jaya, M., Putra, A., Sinaga, O., & Bainus, A. (2019). Peran Unit Counter Trafficking International Organization for Migration (IOM) dalam Menangani Ancaman Keamanan Non-Tradisional (Perdagangan TKI Ilegal) di Provinsi NTB. In *Dinamika Global* / (Vol. 03, Issue 02).

- Jmk. (2022). *Faktor-Faktor Penyebab Perdagangan Anak*. Dppkbpppa.Pontianak.Go.Id.
<https://dppkbpppa.pontianak.go.id/informasi/berita/faktor-faktor-penyebab-perdagangan-anak>
- Kasmad, R. (2013). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Kedai Aksara.
- KEMENPPPA. (2023). *Perdagangan Perempuan dan Anak sebagai Fenomena Gunung Es*. Kemenpppa.Go.Id. www.kemenpppa.go.id
- Kemnaker selidiki dugaan TPPO di Batam. diakses melalui <https://www.antarane.ws.com/berita/3484386/kemnaker-selidiki-dugaan-tpo-di-batam> pada 12 Januari 2025.
- Kriswibowo, A., Napitupulu, B. B. P., Mushfiya, P., Rochman, P. A., & Mailan, R. (2023, Desember 1). Kebijakan Keimigrasian Indonesia: Pandemi, Infrastruktur, Dan Kontrol Perbatasan. *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, 6(2).
- Kulsum, K. U. (2021). *Perdagangan Anak Meningkat di Masa Pandemi*. Kompas.Ig
- Laporan Respons Covid-19 IOM Indonesia 1 Mei-19 Juni 2020, diakses <https://indonesia.iom.int/sites/g/files/tmzbd11491/files/documents/laporan-respons-covid-19-iom-indonesia-8-oktober-2020.pdf>, pada 13 Januari 2025.
- Laporan Situasi Covid-19 IOM Indonesia 8 Oktober 2020, diakses <https://indonesia.iom.int/sites/g/files/tmzbd11491/files/documents/laporan-respons-covid-19-iom-indonesia-8-oktober-2020.pdf>, pada 13 Januari 2025.
- Marlina, L. (n.d.). Peran International Organization for Migration (IOM) dalam Menangani Pengungsi di Kepulauan Riau Tahun 2015-2017, 6, 2.
- Miko, F. T., & Park, G. (Jea-H. (2003). *Trafficking in Women and Children: The U.S. and International Response*.
- Negara, D. P. (2023). Penguatan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Manusia. *Kertas Ilmiah Perseorangan (TASKAP) Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIV Lemhanas Republik Indonesia*, 2.

- Nola, L. F. (2023, November 30). Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Pekerja Migran Indonesia. *Pusat Analisis Keparlemen Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI*, 153.
- Nuraeny, H. (2011). *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya* (1st ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Ombudsman Temukan Masih Banyak Celah untuk Melakukan Praktik TPPO.* (2024, November 29). *Tempo*. Retrieved December 11, 2024, from <https://www.tempo.co/hukum/ombudsman-temukan-masih-banyak-celah-untuk-melakukan-praktik-tpo-1174717>
- Prabawati. Soraya: Tiga Tahun Terakhir Terjadi Fluktuasi Kasus TPPO. <https://diskominfo.kaltimprov.go.id/berita/soraya-tiga-tahun-terakhir-terjadi-fluktuasi-kasus-tpo> pada 12 Januari 2025
- Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.* (n.d.). ohchr. Retrieved December 20, 2024, from <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/protocol-prevent-suppress-and-punish-trafficking-persons>, diakses pada 15 Desember 2024.
- Punagi, R. A. A., Ishartono, & Basar, K. G. G. (2015). Hukum dalam Permasalahan Perdagangan Anak di Indonesia. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1–146.
- Puspa Hapsari, A., Utomo, T. C., & Wahyudi, F. E. (2015). Implementasi Counter-trafficking International Organization for Migration (Iom) Dalam Menanggulangi Perdagangan Manusia Di Indonesia Tahun 2007-2013. *Diponegoro Journal of International Relations*, 1(3), 19.
- Qotrun, A. (n.d.). *Penelitian Kualitatif: Pengertian, Ciri-ciri, Tujuan, Jenis, dan Prosedurnya*. Gramedia.Com. Retrieved December 4, 2023, from <https://www.gramedia.com/literasi/contoh-teks-laporan-percobaan/>
- Rachman, M. I. J. (2018, September 3). Kerjasama Indonesia dengan Lembaga-Lembaga terkait dalam Penanganan Pengungsi. *Jurist Diction*, 1(1), 274.
- Ramadhani Fitria, Sambas Nandang, & Setiawan Dian. (2019). Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Tindak Pidana Perdagangan Anak ditinjau dari

Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Prosiding Ilmu Hukum*.

Rizky Ramadhani, S., Azainafis Haryadi, F., & Cipta Apsari, N. (2023). Peran International Organization for Migration dalam Menangani Perdagangan Manusia di Indonesia The Role of International Organization for Migration in Dealing with Human Trafficking in Indonesia . *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 31.

Rupita, Herlan, Gaffar, Z. H., Rahmaniah, S. E., & Niko, N. (2021). Human Trafficking pada Masa Pandemi COVID-19 di Perbatasan Darat Malaysia Indonesia, Kalimantan Barat. *Jurnal Masyarakat Maritim*, 5(2).

Rusmiyati, Faridah, M., Alma'arif, & Nooraini, A. (2022). Pendekatan Pengelolaan Perbatasan Daerah. In *Manajemen Perbatasan* (pp. 141-142). Cendekia Press.

Rusyidi Binahayati, Nuriyah Eva, & Meilani Lenny. (2017). Kebijakan Perlindungan Sosial dan Pencegahan Retrafficking bagi Anak di Provinsi Jawa Barat. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 140–142.

Silalahi, Ulber. (2009). *Metode penelitian sosial* . Refika Aditama.

Sulistyawati, L., & Christiyaningsih. (2019). *Faktor Ekonomi Mendominasi Penyebab Perdagangan Orang*. Republika.Co.Id.

Sintia, A. (2022). *Bantuan IOM kepada Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Perdagangan Manusia di Indonesia Melalui Pendekatan 3 P (Pencegahan, Penuntutan, Perlindungan) tahun 2018-2022*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung.

Susanti, T. (2008). *Kasus-Kasus Perdagangan Manusia 2004-2008*. Nasional.Kompas.Com.

<https://nasional.kompas.com/read/2008/04/18/02302585/kasus-kasus.perdagangan.manusia.2004-2008?page=all>

Suwanto, B. (2021). Sinkronisasi Penanganan Pandemi Covid-19 antara Pusat dan Daerah. *Kertas Karya Ilmiah Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*.

- Thea, A. (2023, August 1). *4 Tantangan Penegakan Hukum Kasus TPPO*. Hukumonline. Retrieved November 22, 2024, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/4-tantangan-penegakan-hukum-kasus-tpo-lt64c900b8447f1/>
- UN Network on Migration. (2021). *Reclaiming Digital Spaces to Counter Human Trafficking and Protect its Victims*. Retrieved November 21, 2024, from <https://migrationnetwork.un.org/statements/reclaiming-digital-spaces-counter-human-trafficking-and-protect-its-victims>
- Usman, N. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. CV Obor Pustaka, Semarang.
- Weriansyah, A., Assyifa, A., Rahmawati, M., Nasir, M. A., Warneri, M. R., Ismaya, S., & Praptadina, S. B. (2023). *Ringkasan Eksekutif Tinjauan Hukum Implementasi UU PTPO di Indonesia*. Indonesia Judicial Research Society (IJRS).
- Windari, R. (2019). Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Berdasarkan Global - Local Based Approach (Glocalization). *Soumatra Law Review*, 2(2), 282. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4369>
- Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publik*. Pt. Buku Kita, Jakarta.
- Wismayanti, Y. F. (2009). Perdagangan Anak sebagai Bentuk Pelanggaran Hak-Hak Anak. *Jurnal Sosio Informa*, 14(3), 21.
- Yunardi, A. N. (2021). Peran International Organisation for Migration (IOM) dalam Penanganan Human Trafficking Warga Negara Indonesia di Uni Emirat Arab. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 6(2). <https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesia><https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesia>
- Yuniarti, D. (2019, Desember). Dampak Penutupan Pos Lintas Batas Negara (PL Aruk terhadap Sosial Ekonomi Pekerja Migran Indonesia di Masa Pandemi Covid-19. *Journal IAI Sambas*, 2(2), 258-273.
- Yusuf. (2022). *Gugus Tugas Bahas Urgensi Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Kominfo.Go.Id.